

# KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA (Studi Kasus: Desa Pacet Mojokerto)

Yuni Reza Sholikhah<sup>1</sup>, Dian Wijaya<sup>2</sup>, Rachman Sidharta Arisandi<sup>3</sup>

Universitas Islam majapahit

**ABSTRAK** :Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana implementasi kebijakan pemerintahan desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Pacet. Peningkatan kemandirian desa sangat erat kaitannya dengan kemampuan desa dalam mengelola Pendapatan Asli Desa (PADes). Desa Pacet merupakan sebuah desa yang dijuluki sebagai daerah wisata Kecamatan Pacet, dengan adanya aset dan potensi alam yang dapat dimanfaatkan sebagai ladang meningkatkan perekonomian. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua penelitian yaitu Teori AGIL Talcott Parsons dan Konsep Kebijakan Publik. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian maka dapat penulis simpulkan bahwa keberhasilan atau tidaknya peningkatan pendapatan asli desa ini tidak terlepas dari peran pemerintah desanya untuk mengatur dengan baik aset-aset dan potensi desa yang mereka miliki. Selain itu, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kinerja desa bagi desa BUMDES Pacet bisa di ukur dari hasil anggaran yang masuk dari aset desa pertahun yang dilihat dari jangka pendek serta menengah kebijakan pemerintah desa dalam memajukan kinerja desa bagi BUMDES perekonomian desanya juga menjadi kunci keberhasilan desa tersebut dalam mengelola potensi desanya. Maka dalam hal ini antara pemerintah desa dan masyarakat saling berkontribusi dalam usaha meningkatkan pendapatan asli desa.

**Kata Kunci** : Kebijakan, PADes, BUMDES

## 1. PENDAHULUAN

Desa merupakan unit terkecil dari negara yang terdekat dengan masyarakat dan secara riil langsung menyentuh kebutuhan masyarakat untuk disejahterakan. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai wakil negara, desa wajib melakukan pembangunan baik pembangunan fisik maupun pembangunan sumber daya manusia, sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan dilaksanakan oleh kepala desa dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam sistem negara pemerintah sangat dibutuhkan untuk masyarakat yaitu mengayomi serta memenuhi kebutuhan

rakyat karena sifat hakikat negara memiliki sifat memaksa, memonopoli dan mencakup keduanya. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati oleh sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Daya tarik dari desa pacet tersebut yaitu dari letak wilayah yang ditinggikan dekat dengan gunung dan bukit yang tampak jauh lebih dekat, dan juga banyak tempat wisata-wisata yang bisa dikunjungi seperti pemandian air panas, air terjun, dan masih banyak tempat wisata yang ada di desa pacet, dari beberapa wisata tersebut yang sering dikunjungi dari wisatawan baik remaja sampai dewasa yaitu tempat kuliner yang ada didesa pacet terutama icon dari desa pacet.

Dengan adanya potensi alam yang dapat dimanfaatkan sebagai ladang meningkatkan perekonomian maka Pemerintah Desa Pacet sudah selayaknya bisa memanfaatkan Potensi tersebut. Akan tetapi perlu digaris bawahi bahwasannya peranan Pemerintah Desa sangat vital, bagaimana upaya dari Pemerintah Desa untuk bisa menjadikan masyarakat Desa Pacet terangkat perekonomiannya dengan banyaknya potensi-potensi yang

- *Yuni Reza Sholikhah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Majapahit Mojokerto. Email: [yunireza653@gmail.com](mailto:yunireza653@gmail.com)*
- *Dian Wijaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Majapahit Mojokerto. Email: [dianwijayasip@gmail.com](mailto:dianwijayasip@gmail.com)*
- *Rachman Sidharta Arisandi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Majapahit Mojokerto.*

dimilikinya. Tentunya upaya memberdayakan masyarakat sangat dibutuhkan guna untuk meningkatkan ketrampilan, kreatifitas serta wawasan masyarakat tentang pemanfaatan potensi-potensi yang berada di Kecamatan Pacet. Pemerintah dan masyarakat tentunya harus saling bersinergi dan mempunyai visi yang sama yaitu sama-sama ingin menjadikan daerah Pacet sebagai ladang untuk meningkatkan perekonomian kawasan Pacet guna meningkatkan Pendapatan Asli Desa Pacet serta kinerja desa bagi BUMDes Pacet.

Bagaimana Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Pacet dari Jangka pendek sampai Jangka Menengah?

Berdasarkan implementasi tersebut, makatujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya-upaya kebijakan seperti apa Pemerintah Desa Pacet dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).

## 2. LANDASAN TEORI

### Skema AGIL Talcott Parsons

Talcott Parsons melahirkan teori fungsional tentang perubahan. Dalam teorinya, Parsons menganalogikan perubahan sosial pada masyarakat seperti halnya pertumbuhan pada makhluk hidup. Komponen utama pemikiran Parsons adalah adanya proses diferensiasi. Parsons berpendapat bahwa setiap masyarakat tersusun dari sekumpulan subsistem yang berbeda berdasarkan strukturnya maupun berdasarkan makna fungsionalnya bagi masyarakat yang lebih luas. Ketika masyarakat berubah, umumnya masyarakat tersebut akan tumbuh dengan kemampuan yang lebih baik untuk menanggulangi permasalahan hidupnya. Dapat dikatakan Parsons termasuk dalam golongan yang memandang optimis sebuah proses perubahan. Menurut teori fungsionalis ini masyarakat adalah "suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam kesimbangan. Perubahan yang terjadi satu bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagian lain. Talcott Parsons telah banyak menghasilkan sebuah karya teoritis. Ada beberapa perbedaan penting antara karya awal dengan karya akhirnya. Pada bagian ini membahas karya akhirnya yaitu Teori Fungsionalisme Struktural. Talcott Parsons terkenal dengan empat imperatif fungsional bagi sistem "tindakan" yaitu skema AGIL. AGIL, fungsi adalah suatu gugusan aktivitas yang di arahkan untuk memenuhi satu atau beberapa kebutuhan sistem. Parsons menyakini bahwa perkembangan masyarakat berkaitan erat dengan perkembangan keempat unsur subsistem utama yaitu kultural (pendidikan), kehakiman

(integrasi), pemerintahan (pencapaian tujuan) dan ekonomi (adaptasi).

Menggunakan definisi ini, Parsons percaya bahwa ada empat imperatif fungsional yang diperlukan atau menjadi ciri seluruh sistem –adaptasi (Adaptation), (Goal attainment/pencapaian tujuan), (Integrasi) dan (Latency) atau pemeliharaan pola. Secara bersama-sama, keempat imperatif fungsional tersebut di sebut dengan skema AGIL. Agar bertahan hidup maka sistem harus menjalankan keempat fungsi tersebut :

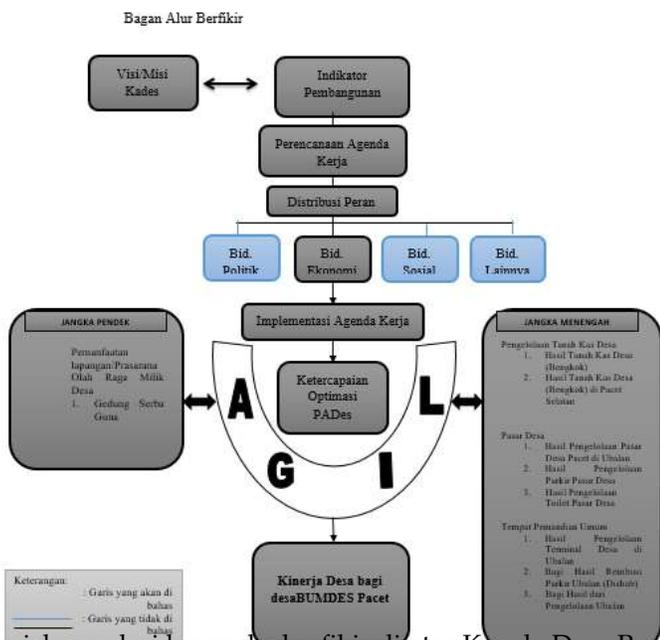
- Adaptasi, sistem harus mengatasi kebutuhan situasional yang datang dari luar. Ia harus beradaptasi dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan dengan kebutuhan-kebutuhannya.
- Goal/Pencapaian tujuan, sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan-tujuan utamanya.
- Integrasi, sistem harus mengatur hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Ia pun harus mengatur hubungan antar ketiga imperatif fungsional tersebut (A,G,I,L).
- Latency (pemeliharaan pola), sistem harus melengkapi, memelihara dan memperbaharui motivasi individu dan pola-pola budaya yang menciptakan dan mempertahankan motivasi tersebut.
- Teori Implementasi Kebijakan George C. Edward
- Edward III dalam Subarsono, berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:
  - a. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
  - b. Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
  - c. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika

- implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
- d. Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.
  1. Menurut pandangan Edwards dalam Budi Winarno, menyatakan bahwa sumber-sumber yang penting meliputi, staff yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik.
  2. Struktur Birokrasi menurut Edwards dalam Budi Winarno, terdapat dua karakteristik utama, yakni Standard Operating Procedures (SOP) dan Fragmentasi.

4. Pemanfaatan potensi Desa dari sumber daya alam (Aset desa) guna peningkatan dan pemerataan pembangunan disegala bidang baik ekonomi, sosial, budaya (pendidikan, keagamaan dan kepemudaan) dalam rangka mewujudkan Desa Pacet sebagai desa yang mempunyai nilai tambah dan dapat menjadi salah satu tempat kunjungan wisata,
5. Mengupayakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat dengan potensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya,
6. Menjalin kerjasama yang baik dengan lembaga dan aparatur desa serta semua lapisan masyarakat.
  - a. Dari visi misi itu sangat berkaitan dengan indikator-indikator pembangunan desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa Pacet, sebelum menyelenggarakan program pemerintah desa diadakanlah suatu perencanaan agenda kerja agar terlaksanakan seluruh program yang sudah terbagi dari bidang sosial, bidang politik, bidang ekonomi dan bidang lainnya. Program yang sudah di rencanakan oleh Pemerintah Desa akan didistribusi perankan ke sesuai bidangnya.
  - b. Peneliti mengambil terkhususnya di bidang ekonomi karna sangat berkaitan dengan meningkatkan pendapatan asli desa pacet guna kinerja desa bagi desa BUMDES pacet. Implementasi pemerintah desa dalam meningkatkan PADes dengan cara konsep Kebijakan Publik yang dilakukan oleh Edward III yang berkaitan dengan indikator yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan dengan beberapa elemen yaitu:

- Komunikasi
- Komunikasi yang dilakukan pemerintah desa yakni bekerjasama dengan LPM (Lembaga Permusyawaratan Mastarakat). Kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan dengan LPM untuk membangun komunikasi dengan masyarakat. Komunikasi pemerintah desa dengan masyarakat melalui LPM guna untuk menampung setiap usulan/ aspirasi dari masyarakat terkait rencana-rencana pembangunan desa dalam meningkatkan PADes. Usulan rencana yang disampaikan masyarakat tersebut kemudian akan disampaikan kepada desa yang nantinya akan dibahas dalam forum musyawarah desa. Hal tersebut merupakan bentuk komunikasi yang akan membantu pemerintah desa melihat usulan yang disampaikan sesuai atau tidak dengan apa yang dibutuhkan masyarakat, dan sesuai atau tidak dengan kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah desa.

Bagan Alur Berfikir



Penjelasan dari kerangka berfikir di atas Kepala Desa Pacet mempunyai sebuah visi misi, di dalam visi misi kepala desa:

3. Mengutamakan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi atau golongan atas dasar musyawarah dan mufakat,

### • Sumberdaya

Sumberdaya dalam hal ini adalah sumberdaya manusia yakni masyarakat desa pacet. Masyarakat desa pacet merupakan sumberdaya manusia yang ikut berpartisipasi dalam melaksanakan pengimplementasian kebijakan pemerintah dalam bentuk usulan atau berupa tenaga masyarakat (gotong royong). Sumberdaya manusia yang dimunculkan pada masyarakat desa pacet berbentuk gotong royong. Kegotong royongan masyarakat di desa pacet sangat kuat, dinilai berdasarkan materi jumlahnya tidak sedikit. Misalkan ada kegiatan desa dengan melibatkan masyarakat. Masyarakat akan dengan sukarela membantu perangkat desa dengan menyediakan makanan untuk para pekerja.

### • Disposisi

Disposisi atau kecenderungan perilaku terhadap kebijakan, terlihat bahwa para pelaksana kebijakan tersebut mendukung adanya kebijakan kepala desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa. Sebelum adanya kebijakan tersebut, aparatur desa melihat kondisi lingkungan di desa pacet. Hal tersebut guna untuk melindungi masyarakat desa pacet agar mempertahankan dan menguatkan daya perekonomian masyarakat asli desa dari masyarakat luar desa pacet.

### • Struktur Birokrasi

Birokrasi berkaitan dengan SDM yang menjalankan organisasi mempunyai tatanan atau struktural. Desa pacet dalam hal ini memiliki struktur birokrasi yang baik. Kondisi tersebut terlihat dari pola birokrasi yang digunakan di desa pacet. Desa pacet dalam menjalankan tatanan atau aturan sebuah kebijakan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa pacet, menjalin kerjasama dengan LPM sebagai penampung usulan dari masyarakat. Usulan masyarakat yang telah ditampung oleh LPM kemudian disampaikan kepada sekretaris desa. Sekretaris desa selanjutnya menyampaikan usulan tersebut kepada kepala desa. Usulan tersebut akan pertimbangan oleh kepala desa dalam tahap perumusan kebijakan yang nantinya akan di implementasikan.

Ketercapaian Optimasi PADes di katakan berhasil peneliti menggunakan teori Talcot Parson Struktural Fungsional untuk melihat fenomena didalam masyarakat yang terdiri berbagai elemen atau struktur, setiap struktur mempunyai fungsi masing-masing, dalam melihat sistem sosial tersebut ada skema yang disebut A,G,I,L.

Yang dimaksud dari A,G,I,L yaitu:

o Adaptasi, kepala desa harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan juga aset-aset desa pacet untuk mempermudah melaksanakan visi/misi kepala desa.

• Goal, suatu ketercapaian kepala desa dalam menjalankan visi/misi yang menjadi sebuah program kerja untuk meningkatkan pendapatan asli desa.

• Integrasi, kepala desa juga harus menjaga pola hubungan birokrasi yang sehat dan saling membangun komunikasi yang baik dengan semua divisi untuk mempertahankan satu kesatuan.

• Latency, pemerintah harus memberikan motivasi disetiap bidang guna melengkapi, memelihara ataupun memperbaiki satu sama lain, jika tidak ada keberhasilan untuk meningkatkan pendapatan asli desa di tahun 2020 ini pemerintah desa pacet akan saling memberikan motivasi ataupun pembenahan agar pendapatan asli desa pacet tidak kurang dari hasil aset desa melainkan pendapatan asli desa pacet bisa dikatakan tetap.

### 3. METODE PENELITIAN

#### Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dimana, dalam penelitian ini saya menggambarkan objek yang saya teliti berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat saya amati.

#### Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini diarahkan pada kebijakan seperti apa yang dilakukan oleh perangkat Desa Pacet untuk meningkatkan pendapatan asli desa, sehingga peneliti perlu menentukan subyek dalam menentukan sasaran penelitian. Dengan memperhatikan potensi-potensi yang sudah ada di desa pacet, maka peneliti mengarahkan sasaran penelitian kepada Kepala Desa Pacet (Yadi Mustofa), dan Kaur Pemerintah (Suntari), dan Tokoh Masyarakat.

#### Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Balai Desa Pacet, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto yang bertempat di Jln.Kartini No.51, Pacet Mojokerto Jawa Timur.

#### Teknik Penentuan Informan

Informan adalah orang yang memberi Informasi tentang apa yang terjadi di latar atau situasi penelitian. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik Purposive Sampling. Menurut Sugiyono dalam penelitian Kualitatif, Purposive Sampling

yaitu teknik pengambilan sampel didasarkan atas tujuan tertentu (orang yang dianggap paling mengetahui apa yang diharapkan). Dimana cara penentuan informan yang ditetapkan secara tidak sengaja atas dasar kriteria yang sesuai dengan kebutuhan peneliti.

#### Teknik Pengumpulan Data

Penelitian yang dilakukan peneliti dalam sub bab berikutnya dengan menggunakan tiga cara yaitu teknik pengumpulan data dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Observasi, Wawancara, Dokumen.

#### Analisis Data

Analisis data adalah mekanisme untuk mengatur urutan data dan mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar. Analisis data memiliki posisi riskan dalam sebuah penelitian sebab dalam menganalisis harus dengan teknik yang benar agar hasil analisa yang didapat menjadi tepat. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan langkah langkah yang diutarakan oleh Burhan Bugin, diantaranya. Pengumpulan data, Reduksi Data, Display Data, Verifikasi dan penegasan kesimpulan.

### 4. PEMBAHASAN

#### Maksud dan Tujuan Desa Pacet

Dokumen ini disusun dengan maksud untuk memberikan pegangan atau pedoman pada Pemerintah Desa tentang kegiatan-kegiatan pembangunan yang akan dan sedang dilaksanakan dalam jangka menengah, yakni selama 6 tahun. Dokumen ini juga dimaksudkan sebagai visi, misi dan program strategis yang akan dilaksanakan oleh Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan Desa selama masa jabatannya.

Penetapan kembali RPJM-Desa Pacet, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto Tahun 2014-2019 merupakan kelanjutan dan pembaharuan dari tahap pembangunan sebelumnya. Penetapan kembali RPJM-Desa diarahkan untuk memberikan fokus yang semakin tajam dan tepat guna menyelesaikan permasalahan-permasalahan pembangunan secara spesifik di Desa Pacet.

#### a. Visi-Misi

Visi merupakan pandangan jauh ke deapan, ke mana dan bagaimana Desa Pacet harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stakeholder's.

Cita-cita masa depan sebagai tujuan jangka panjang yang ingin diraih Desa Pacet merupakan arah kebijakan dari RPJM Desa yang dirumuskan setiap enam tahun sekali. Cita-cita itulah yang kemudian mengerucut sebagai visi Desa. Pernyataan Visi Desa Pacet adalah :

“Terselenggaranya pemerintahan Desa Pacet yang bersih dan transparan demi terwujudnya tata kehidupan masyarakat yang tentram, adil dan sejahtera.”

Melalui Visi ini diharapkan masyarakat menemukan gambaran kondisi masa depan yang lebih baik (ideal) dan merupakan potret keadaan yang ingin dicapai, dibanding dengan kondisi yang ada saat ini. Melalui rumusan Visi ini diharapkan mampu memberikan arah perubahan masyarakat pada keadaan yang lebih baik, menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mengendalikan dan mengontrol perubahan-perubahan yang akan terjadi, mendorong masyarakat untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik, menumbuhkan kompetisi sehat pada anggota masyarakat, menciptakan daya dorong untuk perubahan serta mempersatukan anggota masyarakat.

#### b. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.

Hakikat Misi merupakan turunan dari visi yang akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi merupakan penjabaran lebih operatif dari Visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi dan kondisi lingkungan dimasa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai visi Desa selama masa lima tahun. Untuk meraih Visi desa seperti yang sudah dijabarkan diatas, dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Desa sebagai berikut:

- Mengutamakan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi atau golongan atas dasar musyawarah dan mufakat;
- Pemanfaatan potensi Desa dari sumber daya alam (Aset desa) guna peningkatan dan pemerataan pembangunan disegala bidang baik ekonomi, sosial, budaya (pendidikan, keagamaan dan kepemudaan) dalam rangka mewujudkan Desa Pacet sebagai desa yang mempunyai nilai tambah dan dapat menjadi salah satu tempat kunjungan wisata;

- Mengupayakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat dengan potensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya;
- Menjalin kerjasama yang baik dengan lembaga dan aparatur desa serta semua lapisan masyarakat.
- Arah Kebijakan Pembangunan Desa  
Pembangunan diarahkan pada pengembangan pusat-pusat pertumbuhan untuk mendorong pengembangan pedesaan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi serta mendorong keterkaitan desa-kota. Kebijakan pembangunan ini dilakukan dengan strategi sebagai berikut:
  - Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
  - Pelaksanaan Pembangunan Desa
  - Pembinaan Kemasyarakatan
  - Pemberdayaan Masyarakat Desa
  - Rencana Pembangunan Desa
  - Rencana program pembangunan desa dalam 6 tahun ke depan yaitu:
    - Penyediaan sarana prasarana pendidikan formal, non formal dan informal yang memadai.
    - Melancarkan akses menuju pusat pemerintahan, peribadatan, pendidikan, kesehatan, pasar, dan penyedia layanan publik lainnya.
    - Program peningkatan jalan lingkungan dan jalan penghubung antar dusun
    - Program pemeliharaan jalan penghubung antar dusun.
    - Pengendalian banjir dalam setiap musim hujan melalui normalisasi saluran tersier.
    - Merangsang pertumbuhan ekonomi masyarakat.
    - Pemenuhan akses air bersih bagi masyarakat.
    - Peningkatan cakupan pengairan lahan pertanian.
    - Peningkatan jalan pertanian.

Upaya pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat

Sejalan dengan pembangunan desa dari segi aspek pendapatan dibidang ekonomi, pembangunan sumber daya manusia Desa Pacet juga mengalami peningkatan khususnya dalam pengembangan usaha ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat dengan diberikan suatu pelatihan terkait pengembangan produk lokal desa tersebut. Masyarakat diberikan pelatihan-pelatihan diharapkan dapat mengembangkan produk-produk lokalnya. Hal tersebut juga dapat dipertegas oleh Nuriyanto:

“Aparatur Pemerintah Desa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat Desa Pacet yakni berusaha untuk menggandeng atau bekerja sama dengan BLK(Balai Latihan Kerja) terkait peningkatan mutu. Kemudian BKKN (Badan

Kependudukan dan Keluarga Berencana) terkait cara pengemasan dan penjualan yang baik.”

Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa pemerintah Desa Pacet dapat membangun, memanfaatkan, dan mengeksploitasi dengan tepat (optimal, efektif, dan efisien). Dimana segala potensi dan sumber daya yang telah dimiliki desa mampu memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan memberikan perubahan ke arah yang lebih baik.

Pendapatan yang diterima oleh Desa Pacet

Dengan adanya otonomi daerah, setiap daerah dapat mengembangkan daerahnya masing-masing dengan mengembangkan setiap potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Terdapat beberapa sektor yang dapat dikembangkan yakni, seperti sektor di bidang sosial, politik, ekonomi dan lain sebagainya. Akan tetapi, peneliti lebih tertarik pada salah satu sektor dibidang ekonomi. Karena pemerintah desa memiliki potensi yang besar untuk dapat dikembangkan. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya pendapatan yang diterima yaitu, dari parkir. Terutama pada tukang parkir yang berada di wisata ubalan, pujasera, dan pasar desa. Hal tersebut juga dapat dipertegas oleh Likan yang menyatakan bahwa:

“Selain dari parkir. Pendapatan yang diterima dapat dilihat dari lapaknya, yakni lapak yang berada di Bunderan, lapak pujasera dan lapak Ubalan. Untuk lapak yang berada di ubalan biasanya disewakan tiap bulan. Karena lapak tersebut merupakan pemilik dari Desa Pacet.”

Sedangkan untuk persewaan lapak yang berada di Bunderan masuk ke bumdes dan dikelola oleh bumdes. Apabila bumdes sudah berkembang, maka hasil pendapatan yang diterima akan masuk ke rekening desa yang dapat digunakan untuk tambahan pembangunan dan tambahan kesejahteraan masyarakat Desa Pacet.

Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa pemerintah Desa Pacet dalam upaya meningkatkan PADes sudah bisa dikatakan cukup baik. Karena dengan mengoptimalkan wisata yang ada, seperti wisata ubalan, griya kuliner (pujasera), dan pasar desa. Peningkatan pada sumber pendapatan desa tersebut dilakukan sesuai dengan retribusi ke desa yang dinaikkan setiap tahunnya. Sehingga potensi wisata yang dikelola oleh pemerintah Desa Pacet mempunyai daya tarik tersendiri untuk dapat meningkatkan PADes yang dilihat dari sektor pendapatan masyarakatnya.

Mengoptimalkan Bumdes

Dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Pendapatan Asli

Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa. Selain itu, dijelaskan pula dalam UU tersebut bahwa hasil usaha yang dimaksud di dalam pendapatan asli Desa adalah bersumber dari Bumdes dan tanah bengkok. Hal tersebut dapat dipertegas oleh Hari masyarakat Desa Pacet yang menyatakan bahwa:

“Pemerintah Desa Pacet dalam meningkatkan Bumdes dapat dilihat dari Bunderan, dan akan dibuatkan Pasar Sayur”

Dipertegas kembali oleh Meme bahwa:

“untuk pasar Sayur yang saya dengar dari kebijakan Kades untuk program selanjutnya seperti.”

Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa pemerintah Desa Pacet dalam meningkatkan pendapatan asli desa sudah bisa dikatakan cukup baik. Karena dengan mengoptimalkan wisata yang ada, seperti Bunderan, serta akan dibuatkan pasar sayur. Dimana pengoptimalan tersebut bertujuan untuk meningkatkan perekonomian Desa Pacet itu sendiri, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa, mengembangkan kerjasama usaha antar desa dan pihak ketiga, membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

#### Analisis Data

Implementasi kebijakan publik yang dilakukan oleh Edward III terkait beberapa indikator yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan meliputi:

#### Komunikasi

Merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan, dimana pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan. Apabila komunikasi berjalan dengan baik sehingga setiap kebijakan dapat dikomunikasikan kepada bagian personalia yang tepat, jelas dan konsisten. Hal tersebut dipertegas oleh Suntari menyatakan bahwa:

“jadi kepala desa itu juga bekerjasama dengan lembaga permusyawaratan masyarakat mbak, gunanya ya setiap pendapat atau aspirasi yang di sampaikan itu ke anggota LPM, nanti LPM akan menyampaikan ke kepala desa

dengan adanya forum khusus untuk membahas usulan dari masyarakat itu”

Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa komunikasi yang dilakukan pemerintah desa yakni bekerjasama dengan LPM (Lembaga Permusyawaratan Masyarakat). Kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan dengan LPM untuk membangun komunikasi dengan masyarakat. Komunikasi pemerintah desa dengan masyarakat melalui LPM guna untuk menampung setiap usulan dari masyarakat terkait rencana-rencana pembangunan desa dalam meningkatkan PADes. Usulan rencana yang disampaikan masyarakat tersebut kemudian akan disampaikan kepada desa yang nantinya akan dibahas dalam forum musyawarah desa. Hal tersebut merupakan bentuk komunikasi yang akan membantu pemerintah desa melihat usulan yang disampaikan sesuai atau tidak dengan apa yang dibutuhkan masyarakat, dan sesuai atau tidak dengan kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah desa.

#### Sumberdaya

Sumberdaya merupakan salah satu faktor penting yang dapat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik yang terdiri dari beberapa faktor, yaitu sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, sumberdaya fasilitas dan sumberdaya kewenangan. Hal tersebut dipertegas oleh Suntari bahwasannya:

“untuk kebijakan kepala desa kewarga setempat memang ada biasanya aktif untuk membantu kalau ada kegiatan di desa, dari adanya kegiatan desa seperti pembangunan sampai kegiatan program jumat sehat itu warga banyak ikut membersihkan bukan hanya petugas kebersihan melainkan masyarakat desa pacet setempat juga ikut berpartisipasi. Karna masyarakat desa pacet merupakan sumberdaya manusia yang ikut berpartisipasi dalam melaksanakan pengimplementasian kebijakan pemerintah dalam bentuk usulan atau berupa tenaga masyarakat (gotong royong), Misalkan ini ada kegiatan desa dengan melibatkan masyarakat, masyarakat akan dengan sukarela membantu perangkat desa dengan menyediakan makanan untuk para pekerja.”

Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa sumberdaya yang dilakukan pemerintah desa yakni sumberdaya manusia yang dimunculkan pada masyarakat desa pacet berbentuk gotong royong. Kegotongroyongan masyarakat di desa pacet sangat kuat, dinilai berdasarkan materi jumlahnya tidak sedikit.

## Disposisi

Disposisi atau kecenderungan perilaku terhadap kebijakan, terlihat bahwa para pelaksana kebijakan tersebut mendukung adanya kebijakan kepala desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa. Hal tersebut dipertegas oleh Suntari bahwasannya:

“Sebelum adanya kebijakan kepala desa itu di rencanakan atau dibuat, aparatur desa juga harus tau bagaimana kondisi lingkungan di desa pacet, hal tersebut guna untuk melindungi masyarakat desa pacet agar mempertahankan dan menguatkan daya perekonomian masyarakat asli desa dari masyarakat luar desa pacet”

Berdasarkan Hasil wawancara diatas sebelum kepala desa membuat suatu kebijakan untuk meningkatkan pendapatan asli desa pacet, kepala desa pacet dan aparatur desa juga harus tau kondisi lingkungan desa.

## Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan faktor penting yang juga dapat menentukan keberhasilan atau pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik, dimana kebijakan yang begitu kompleks menurut adanya kerjasama banyak orang. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia. Maka hal ini akan menjadi penyebab penghambat dan tidak efektif jalannya implementasi kebijakan, birokrasi berkaitan dengan SDM yang menjalankan organisasi mempunyai tatanan atau struktural. Hal tersebut di pertegas oleh Kartono yang menyatakan bahwa:

“Desa pacet dalam hal ini memiliki struktur birokrasi yang baik. Kondisi tersebut terlihat dari pola birokrasi yang digunakan di desa pacet. Desa pacet dalam menjalankan tatanan atau aturan sebuah kebijakan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa pacet, menjalin kerjasama dengan LPM sebagai penampung usulan dari masyarakat”

Kemudian untuk menjelaskan struktur birokrasi juga dipertegas oleh Muzayin yang menyatakan bahwa:

“Usulan masyarakat yang telah ditampung oleh LPM kemudian disampaikan kepada sekertaris desa. Sekretaris desa selanjutnya menyampaikan usulan tersebut kepada kepala desa. Usulan tersebut akan pertimbangan oleh kepala desa dalam tahap perumusan kebijakan yang nantinya akan di implementasikan”

Dalam teori Struktural Talcott Parson ada empat persyaratan yang harus ada yaitu adaptasi (A/adaptation), (Goal attainment/pencapaian tujuan), (integrasi) dan (Latency) atau pemeliharaan pola.

Adaptasi (adaptation)

Sistem harus dapat merawat sehingga akan mampu untuk beradaptasi dengan situasi lingkungan eksternal. Sistem juga harus dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungan sekitar dalam menghadapi perubahan sosial dalam meningkatkan pendapatan asli desa pacet. Hal tersebut dipertegas oleh Yadi Mustofa:

“Dalam sistem tersebut saya memang harus beradaptasi dengan lingkungan, dari bagian pacet utara, pacet selatan, pacet barat, pacet timur itu apa saja, dan harus tau aset apa saja yang dimiliki desa pacet untuk mempermudah melaksanakan visi/misi saya, dan tidak asal dalam membuat sebuah visi-misi.”

## Pencapaian Tujuan (goal attainment)

Sistem harus bisa memberikan penjelasan dalam mencapai tujuan utama yang di inginkan, setiap perilaku atau tindakan manusia pasti mempunyai tujuan tertentu. Tetapi tujuan individu seringkali menjadikan pertentangan dengan tujuan-tujuan lingkungan sosial yang menyangkut kepentingan orang banyak dari pada kepentingan dirinya sendiri dalam hal ini dapat berlaku di lingkungan pemerintah khususnya di Desa Pacet, dalam pencapaian tujuan aparatur harus mempunyai misi yang jelas dari pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kinerja desa bagi desa BUMDES Pacet bisa di ukur dari hasil anggaran yang masuk dari aset desa pertahun. Batas minimal yang bisa diukur dari pencapaian kepala desa dari visi/misi tersebut dari nominal anggaran PAD ± 70.000.000,00 /Tahun.

Dari hasil diatas membuktikan bahwa pendapatan asli desa belum bisa dikatakan meningkat. Karena dalam anggaran tersebut tidak ada peningkatan dari anggaran semula akan tetapi menjadi anggaran tetap, hal tersebut dikarenakan dampak dari COVID-19 sehingga tidak ada peningkatan dari Pendapatan Asli Desa Pacet.

Kemudian berdasarkan hasil Penelitian yang sudah dilakukan beberapa hari yang lalu di Kantor Desa Pacet, dalam hal ini upaya kebijakan pemerintah desa pacet bisa dikatakan berhasil atau tidak dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa yaitu dilihat dari ketercapaian optimasi PADes dari dana terbesar yang masuk adalah dari hasil Pengelolaan Tanah Kas Desa yang diantaranya ada 1) Hasil Tanah Kas Desa (Bengkok) berjumlah 221.000.000,00 dalam petahun; 2) Hasil tanah Kas Desa (Bengkok) di Pacet Selatan berjumlah 9.600.000,00 pertahun. Namun hasil tersebut dipertegas oleh Nuryanto:

“untuk tanah kas Bengkok, tempat wisata dan pasar kecuai untuk penyewaan yang di gedung serbaguna itu itu bisa dikatakan jangka menengah mbak, ya karena persewaan tersebut itu waktu persewaanya cukup lama antara 4-7 tahunan, nah untuk pesewaan gedungkan sangat jarang paling lama itu 2 minggu pas ada acara bazarbuku selain itu kadang sehari- tiga harian”

Berdasarkan wawancara diatas bisa dikatakan bahwa hasil tanah kas desa tersebut adalah masuk kedata jangka menengah karna Tanah kas desa (bengkok) adalah penyumbang dana terbesar ke PAD. Untuk pasar desa dan tempat pemandian wisata juga dikatakan dari hasil wawancara masuk ke dalam Jangka menengah dikarenakan persewaan tersebut sekitar 4-7 tahun. Dari hasil wawancara tersebut dikatakan secara tidak langsung bahwa persewaan gedung serba guna termasuk jangka pendek, karena persewaan tersebut hanya beberapa minggu dan terkadang harian.

dipertegas dari kuswanoyo:

“untuk ditahun ini memang belum bisa dikatan berhasil untuk meningkatkan PAD dikarenakan kan adanya COVID-19 ini mbak,tetapi juga tidak ada unsur kerugian, jadi insyallah di tahun kedepan akan adanya perbaikan maupun peningkatan, karna untuk visi-misi kepala desa periode kemarin dan periode sekarang itu isinya hampir sama dengan kemarin, kenapa? Ya karna kepala desa mencalonkan lagi dan alhamdulillah jadi lagi”

Jadi, hasil dari penelitian kebijakan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa pacet dikatakan tidak adanya peningkatan hasil aset desa di tahun ini, tetapi dari dampak tidak meningkatnya hasil aset desa bukan berarti Pendapatan Hasil Aset Desa Pacet dikatakan rugi karena dari anggaran semula yang dari desa tidak ada turunnya nominal dari anggaran semula, dan bisa dikatan anggaran tetap.

Integrasi (integration)

Sistem harus bisa mengatur hubungan antara bagian-bagian yang menjadi komponennya. Sistem harus dapat mengatur hubungan dan membangun komunikasi yang baik dengan semua divisi atau harus menjaga hubungan dan mempertahankan satu kesatuannya. Integrasi ini menunjukkan adanya perilaku solidaritas sosial yang membentuk serta membangun peran masing-masing unsur tersebut yang sesuai dengan posisi dan bidangnya. Hal tersebut juga dipertegas oleh Kuswanoyo:

“LPM bertugas menyampaikan usulan tersebut kepada pemerintah desa yang dalam hal ini melalui sekretaris desa. Sekretaris desa selanjutnya yang akan melanjutkan usulan

tersebut kepada kepala desa, hal tersebut dilakukan demi terciptanya tujuan untuk terbentuknya mitra pemerintah desa mendukung suatu program pembangunan dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan”

Integrasi di Desa Pacet terjaga dengan melakukan pola hubungan birokrasi yang sehat. Integrasi dapat ditemukan dalam pola penyampaian usulan masyarakat yang diwadahi sebuah lembaga bentukan pemerintah desa yakni LPM. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ini merupakan sebuah lembaga yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat menyampaikan segala masukan maupun aspirasi yang itu nantinya segala aspirasi terkait akan ditampung, setelah aspirasi masyarakat sudah diserap maka Lembaga Pemberdayaan Masyarakat berkoordinasi dengan lembaga Pemerintahan Desa. Tahapan awal koordinasi yang dilakukan Lembaga Pemberdayaan Desa kepada Sekretaris Desa untuk membahas tentang upaya respon yang akan dilakukan Pemerintah Desa mengenai aspirasi masyarakat yang diserap oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pemeliharaan Pola (Latency)

Sistem harus dapat melengkapi, memelihara dan memperbaiki satu sama lain, baik itu memberikan motivasi individual maupun pola-pola kultural yang bisa menciptakan dan menompang motivasi. Hal tersebut di pertegas oleh Kuswanoyo:

“di pemerintahan Desa Pacet harus dapat memberikan motivasi di setiap bidang mbak karna itu juga sangat penting, dengan memberikan motivasi dapat memperbaiki kinerja aparatur dalam melaksanakan tugasnya dengan baik dan kewajibanya sebagai aparatur pemerintahan di Desa Pacet guna meningkatkan pendapatan asli desa dengan baik juga, dari sini kebijakan pemerintah desa sangat penting guna menjalankan dan melaksanakan pencapaian tujuan tersebut”

Berdasarkan hasil wawancara diatas untuk mengoptimalkan potensi dan kekayaan desa menjadi sumber pendapatan asli desa, perlu menetapkan kebijakan yang menjadi pedoman dan dasar bagi pemerintah desa.

Berdasarkan hasil penelitian selama berada di Desa Pacet, bahwasannya kebijakan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa masih belum bisa dikatakan meningkat. Hal ini terlihat dari adanya wabah COVID-19, sehingga peningkatan pendapatan desa dikatakan tidak adanya peningkatan hasil aset desa di tahun ini, tetapi dari dampak tidak meningkatnya hasil aset desa bukan berarti Pendapatan Hasil Aset Desa Pacet dikatakan

rugi karena dari anggaran semula yang dari desa tidak ada turunnya nominal dari anggaran semula, dan bisa dikatakan anggaran tetap.

Keberhasilan atau tidaknya peningkatan pendapatan asli desa ini tidak terlepas dari peran pemerintah desanya untuk mengatur dengan baik aset-aset dan potensi desa yang mereka miliki. Selain itu, kebijakan pemerintah desa dalam memajukan kinerja desa bagi BUMDES perekonomian desanya juga menjadi kunci keberhasilan desa tersebut dalam mengelola potensi desanya. Maka dalam hal ini antara pemerintah desa dan masyarakat saling berkontribusi dalam usaha meningkatkan pendapatan asli desa.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dan kesimpulan yang telah diperoleh, maka peneliti mencoba memberikan saran:

1. Kepada pihak pemerintah desa Pacet, diharapkan agar lebih meningkatkan lagi kinerjanya dalam usaha meningkatkan pendapatan asli desa supaya menjadikan desa pacet tersebut sukses dalam meningkatkan pendapatan asli desa.
2. Kepada pihak masyarakat, diharapkan agar masyarakat dapat berpartisipasi dengan aktif terhadap setiap kebijakan yang telah diupayakan oleh pemerintah, sehingga bukan hanya pemerintah saja yang berperan mengembangkan atau meningkatkan sumber pendapatan asli desa, melainkan semua unsur yang ada didalamnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Sugiman. "Pemerintahan Desa". Fakultas Hukum Universitas Suryadarma. Vol. 7 No. 1, Juli 2018. Hal 83-85
- [2] J.Dwi Narwoko & Bagong Suyanto. Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan. (Jakarta: Prenada Media, 2004) Hal 350
- [3] George Ritzer. Edisi terbaru Teori Sosiologi. (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2004) Hal 256
- [4] A. G Subarsono. 2011. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal 90-92
- [5] Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. (Jakarta: Alfabeta, 2012). Hal 29
- [6] Sugiyono. 2011. Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. Hal 85
- [7] Tatang M. Amirin. Menyusun Rencana Penelitian. (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1995) Hal 94-95
- [8] Burhan Bungin. Analisis Data Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofis Dan Metodologis Ke Arah Penguasaan Model Aplikasi. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003). Hal 70
- [9] Wawancara dengan Nutyanto, Kaur Keuangan, tanggal 15 Mei 2020 di Kantor Desa Pacet
- [10] Wawancara dengan Likan, Masyarakat Desa Pacet, tanggal 15 Mei 2020 di Tempat Pemandian Umum Ubalan.
- [11] Wawancara dengan Hari, Masyarakat Desa Pacet, tanggal 18 Mei 2020, di Pasar Pacet.
- [12] Wawancara dengan Meme, Masyarakat Desa Pacet, tanggal 18 Mei 2020 di Pasar Pacet.
- [13] Wawancara dengan Suntari, Kaur Pemerintahan, tanggal 19 Mei 2020, di Kantor Desa Pacet
- [14] Wawancara dengan Kartono, Kaur Umum, tanggal 19 Mei 2020, di Kantor Desa Pacet
- [15] Wawancara dengan Muzayin, Kaur Kesra, tanggal 19 Mei 2020, di Kantor Desa Pacet
- [16] Wawancara dengan Yadi Mustofa, Kepala Desa Pacet, tanggal 18 Mei 2020, di Kantor Desa Pacet